

**“RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**



FLORES TIMUR

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNYA, maka penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan rencana kerja Tahun 2023 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Selain itu Renja tahun 2023 merupakan renja tahun awal dalam periode RPD 2023-2026.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPPPD Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini guna membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka, Juni 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Flores Timur,



Apolonia Corebima, S.E, M.Si.

Pemangku Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN BUPATI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPPPD	16
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	18
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPPPD	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	40
BAB V PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	7
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023	21
Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	30
Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPPPPD Tahun 2023.....	33
Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	35
Tabel. 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran	2
---	---



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023. /

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

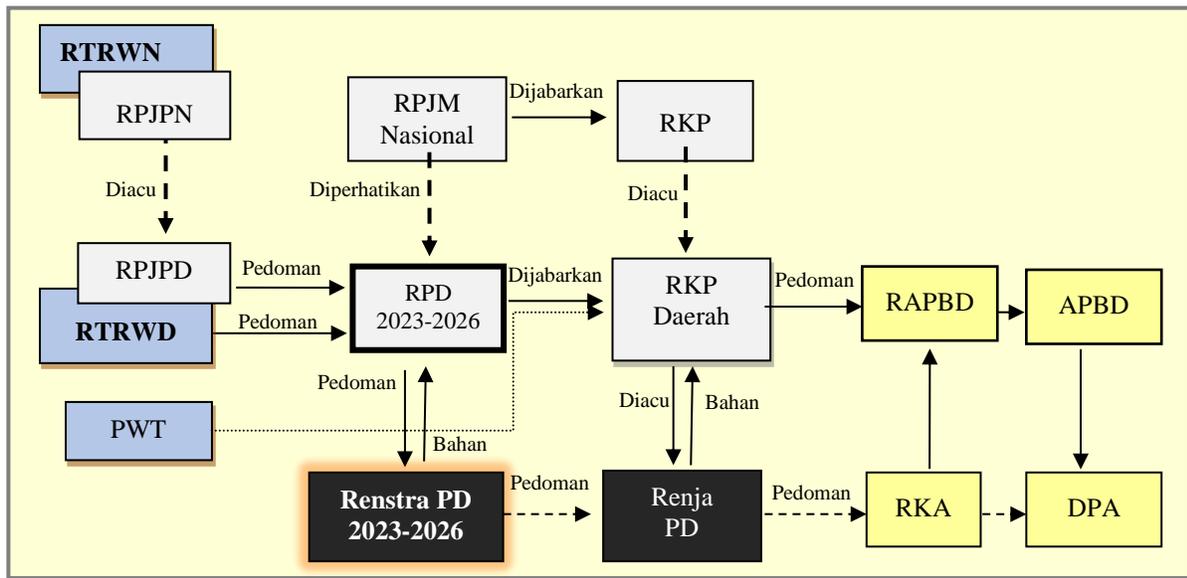
Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
 18. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
 19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja tahun 2023 adalah sebagai acuan

pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2021 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RESNTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2020)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket.
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100						60.00		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	3komponen pertahun	3	3	100.00	3	3.0	100.0		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	3 Jenis = 10 unit AC, 1 paket kain gorden, 1 unit genset	1 jenis (65 lembar gorden)	2	2	100	4	5.0	166.7	
						Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	28 unit (11 laptop, 4 komputer, 9 printer, 1 unit mesin fotocopy mini, 2 unit mesin pemotong rumput, 1	18 unit (9 unit laptop, 2 unit PC, 6 unit printer, 1 unit scanner))	10	10	100.00	4	32.0	114.3	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	140	70	35	35	100.00	35	140.0	100.0	
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	160	86	36	36	100.00	38	160.0	100.0	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	7862	5250	500	500	100.00	5000	5500.0	70.0	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (eks)	3857	1050	360	360	100.00	2	1770.0	45.9	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum yang disediakan (porsi)	13071	4690	400	922	230.60	500	6112	46.8	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	275	121	19	19	100.00	50	190	69.09	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0.00			85 unit (3 buah meja rapat, 82 buah kursi)		
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	7 Unit Kendaraan Roda 2						0	0	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	151 unit (21 meja, 17 kursi, 2 unit bangku panjang, 2 set sofa, 7 unit lemari arsip, 1 rak kayu, 1 unit meja biro)	85 unit (3 buah meja rapat, 82 buah kursi)					85 unit (3 buah meja rapat, 82 buah kursi)	56.29	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)					84.22			47.19	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	4375	1800	319	168	52.66	130	2098.00	47.95	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100	12	60.00	100.00	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	20	18	18	18	100	18	18.00	90.00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RESNTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2020)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket.
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37.28		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)	18 unit = roda 4 (2 unit), roda 2 (16 unit)	18	18	18	100.0	18	18	100.00	
						Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	18 unit = roda 4 (2 unit), roda 2 (16 unit)	18	2	2	100.0	3	18	100.00	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100	1	1	100.00	
						Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	1	1				1	1	100	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer	44	65	62	95.38	20	74.00	100.00	
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	22 unit = 20 AC, 2 generator	7	21	5	23.81	10	22	100.00	
5	01				Perencanaan						100.00			84.90	
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						100.0			91.2	
						Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	5	3	1	1	100.0	1	5	100.00	
						Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	16	11	12	12	100.0	14	14	87.50	
						Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)	500	300	100	100	100.0	100	500	100	
						- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)	57	25	7	7	100.0	7	39	68.42	
						- Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	1000	600	200	200	100.0	200	1000	100.00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						100.00				
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)	500	300	100	100	100	100	500	100.0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RESNTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2020)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket.
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1		0	0		1	1	100	
						Jumlah event penilaian penghargaan pembangunan daerah yang diikuti (kali)						2	2	100	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	1000	600	200	200	100.0	200	1000.0	100.0	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan rancangan awal RKPD tahunan n+1 (dokumen)	15	9	3	3	100.0	3	15	100.0	
						Jumlah dokumen rancangan RPJPD (dokumen)									
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						100				
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen)	5	3	1	1	100	1	5	100.00	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80.00	
						Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)									
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil(buku)	5	3	1	1	100	1	5	100.00	
						Tersedianya data/informasi geospasial dan koordinasi pemetaan (bulan)	60	12				12	24	40.00	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						100.0				
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	10	6	2	2	100	2	10	100.00	
						Jumlah dokumen evaluasi Midterm RPJMD (dokumen)	1						0	0.00	
						Jumlah dokumen evaluasi RPJPD (dokumen)									
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM/NGO)	14	11	12	12	100.0	14	14	100.00	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dokumen)	10	6	2	2	100	2	10	100.0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RESNTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2020)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket.
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					100.00			78.61		
5	01	03				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen)	25	15	5	5	100.00	5	25.00	100.00	
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	30	13	3	3	100.00	6	22.00	73.33	
						Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	40	16	7	7	100.00	2	25.00	62.50	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		25	15	5	5	100.00	5	25.00	100.00	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->pemerintahan			1	1	100	1	2.00		
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	20	12	3	3	100	3	20.00	100	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)	5	3	1	1	1	1	5	100	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		30	13	3	3	100	6	22.00	73.33	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	30	13	2	2	100	3	18.00	73.33	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi -->SDA (dokumen)			1	1	100	3	4.00		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		40	16	7	7	100.00	4	27.00	67.50	

Hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra perangkat daerah dapat dicermati pada Tabel II.1 dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja yang tidak memenuhi target kinerja pada program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- b. Realisasi kinerja sebagian besar program pada tahun 2021 relatif terpenuhi.
- c. Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu.
- d. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya tidak dilakukan penyesuaian kembali antara target kinerja dan anggaran yang disediakan. Faktor penyebab tercapainya target kinerja diantaranya tersedianya sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, adanya rencana pelaksanaan kegiatan serta adanya kerjasama dengan banyak pihak baik secara internal maupun lintas sector dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor penyebab realisasi kinerja melebihi target pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu yakni semakin sering dilakukan koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan mengakibatkan meningkatnya realisasi kinerja pada output sub kegiatan tersebut.
- e. Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana yang sudah ditetapkan dalam renstra yakni
 - Tidak tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Komposisi dan kapasitas aparatur pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai aparatur perencana. Selain secara jumlah masih mengalami kekurangan apabila dibandingkan dengan hasil analisis beban kerja tahun 2019 dan secara kapasitas juga belum memadai karena sebagian besar pejabat fungsional belum mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional. Sementara itu dari tahun 2018 sampai 2021 terdapat 4 tenaga yang ditingkatkan kapasitasnya dari target 24 orang.

- Terbatasnya sarana dan parasaran dalam mendukung perencanaan dan penganggaran terutama adanya tuntutan penggunaan teknologi dan informasi dalam perencanaan yang semakin kompleks.
 - Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor penyebab tersebut yakni perlu adanya pengalokasian anggaran berdasarkan analisa kebutuhan pada BPPPPD terutama yang berkaitan dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang berdampak pada capaian evaluasi secara renja maupun secara renstra serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan selalu memperhatikan capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Flores Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	KU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026												
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd		√	100%	100%	100%	100%	94,15		100%	100%	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke RKPd tidak mencapai 100 % karena selain prioritas pembangunan, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya yang mengakibatkan beberapa program menjadi kegiatan dan beberapa kegiatan menjadi sub kegiatan.
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)		√	-	-	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Jumlah hasil kelitbangan		√	-	-	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	Kegiatan penelitian dilaksanakan 2 kali yakni pada tahun 2019 dan 2021. Untuk tahun 2022 sedang dalam proses penelitian.
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)		√	50 %	100%	100%	100%	0		100%	100%	
Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan Penunjang sesuai Permendagri 86 Tahun 2017												
Penunjang Urusan												
1 Perencanaan Pembangunan												
1:01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RPJPD sudah tersedia dan masih berlaku
1:02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RPJMD sudah tersedia dan masih berlaku. Untuk tahun 2023-2026 menggunakan RPD 2023-2026
1:03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RKPd dihasilkan setiap tahun
1:04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	Dokumen RTRW bukan lagi menjadi kewenangan BPPPPD namun oleh Dinas PUPR
1:05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd		√	100%	100%	100%	100%	94,15%		100%	100%	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke RKPd, Program RKPd ke APBD tidak mencapai 100 % karena selain penyesuaian anggaran berdasarkan prioritas pembangunan, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya yang mengakibatkan beberapa program menjadi kegiatan dan beberapa kegiatan menjadi sub kegiatan.
1:06	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD		√	100%	100%	100%	100%	85,09 %		100%	100%	Penjabaran konsistensi Program RKPd ke APBD tidak mencapai 100 % karena selain penyesuaian anggaran berdasarkan prioritas pembangunan, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya yang mengakibatkan beberapa program menjadi kegiatan dan beberapa kegiatan menjadi sub kegiatan.
4 Penelitian dan Pengembangan												
4:01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		√	80 %	80 %	100%	100%	40%	40%	100%	100%	Penelitian dan pengembangan hanya terlaksana 1 kali pada tahun 2019. Tahun 2020 direncanakan namun tidak terealisasi. Tahun 2021 dilaksanakan penelitian 1 kali. Tahun 2022 penelitian akan dilaksanakan 1 kali.
4:02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		√	100%	100%	100%	100%	50 % (tahun 2019 yang sudah digunakan dalam Perda LP2B)		100%	100%	
	Penerapan SIDA											
4:03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		√	20	50	60	75	-		75	9,37	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	KU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		13
4:04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		√	50	50	100	100	-		100	-	

Dari table II.2 dapat diketahui bahwa untuk penunjang urusan perencanaan pembangunan, ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RTRW pada indicator kinerja tahun 2020 dan 2021 ada, karena dokumen tersebut telah tersedia pada tahun sebelumnya. Untuk dokumen RTRW bukan lagi menjadi kewenangan BPPPPD namun sudah menjadi tanggungjawab Dinas PU-PR. Dengan demikian dokumen tersebut sudah ada, dan masih berlaku selama tahun 2018-2022. Selain ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2021 sebesar 94,5 % sedangkan konsistensi penjabaran RKPD ke APBD Tahun 2021 sebesar 85,09 %. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan anggaran yang berkaitan dengan adanya pandemic covid-19 yang turut mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran serta pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Selain urusan perencanaan, BPPPPD juga melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk tahun 2021 BPPPPD menyelenggarakan kegiatan penelitian pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan judul kajian Identifikasi Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Flores Timur.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi renja dan renstra perangkat daerah serta analisis kinerja pelayanan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan, tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain,:

- a. Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta dokumen yang dihasilkan belum optimal yang mengakibatkan rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
- b. Belum adanya dukungan data yang memadai berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan rendahnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi disebabkan oleh penyusunan dokumen perencanaan belum berkualitas (target dan sasaran tidak jelas, tidak terukur), tidak partisipatif dan tidak tepat waktu.
- c. Belum adanya sistem pengembangan SDM perencana dan penelitian serta analisis kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, serta kurangnya respon terhadap posisi evaluasi, penelitian dan kajian serta inovasi dalam proses perencanaan mengakibatkan lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025.

BPPPPD sebagai sebuah lembaga teknis daerah yang bertugas membantu pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah yang mengemban tujuan/sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang ke 4 (empat) yakni , ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***, dengan sasaran ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pemerintahan pelayanan public***.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius dan lebih focus karena ada tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan selalu berubah-ubah;
2. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan semakin menurun.
3. Kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan semakin kompleks.
4. Terbatasnya kewenangan pejabat perencana pada masing-masing OPD
5. Koordinasi yang belum maksimal antar OPD (*ego sector*)
6. Tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya koordinasi dan pendampingan dari pemerintah tingkat pusat dan provinsi semakin intens.
2. Berlakunya Undang-Undang Desa yang memberi kewenangan perencanaan dan penganggaran pada desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Penggunaan aplikasi data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan struktur dan tata kerja organisasi
5. Pelaksanaan forum lintas sector
6. Peningkatan kapasitas ASN

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
3. Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antar rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi public.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BPPPPD sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat perbedaan jumlah sub kegiatan, anggaran dan kinerja antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Selain adanya penambahan anggaran pada hasil analisis dikarenakan oleh adanya penambahan volume target kinerja, bertambahnya anggaran juga dipengaruhi oleh standar biaya yang semakin meningkat pada tahun 2023. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE					RANCANGAN AWAL RKPd 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting	
								K	Rp			K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				5,226,018,558	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5,602,018,558		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantuka			2,906,518,558	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantuka		3,102,518,558		
						Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	72,500,000		Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	128,400,000	
						Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100.0	127,000,000		Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73.2	186,000,000	
						Larantuka	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	53.8	39,000,000		Larantuka	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	53.8	38,000,000	
							Tingkat Pelayanan Administrasi	100				Tingkat Pelayanan Administrasi	100		
							Perkantoran (%)					Perkantoran (%)			
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	9	26,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	13	75,400,000	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	8,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	45,000,000	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	10,000,000	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	5	15,000,000	Penambahan untuk perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2023
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	2	2,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	5,400,000	Laporan evaluasi per triwulan
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3	2,272,918,558	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	4	2,279,418,558	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting																																												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp				K	Rp																																													
								1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	26/12	2,226,418,558	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	26 org/14 bulan	2,226,418,558																																													
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	36,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	2	38,000,000	Dokumen semester dan tahunan																																												
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	15,000,000																																													
			2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	7	10,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	15,000,000																																													
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(dok)	1	5,000,000		Larantuka																																																
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	5,000,000		Larantuka																																																
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	15,000,000	Penatausahaan barang milik daerah (laporan mutasi barang, inventaris dan laporan aset)																																												
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	39,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	38,000,000																																													
x	xx	01	2.05							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admonistrasi kepegawaian (dokumen)	1	5,000,000	termasuk my sapk, inpassing, berkala dan lain2																																												
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	3,000,000																																																		
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	3,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	5,000,000																																													
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	20,000,000	Diklat dilakukan secara bertahap																																												
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	8,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	8,000,000																																													
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantuka	Persentase pemenuhan administrasi umum PD(%)	100	177,300,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantuka	Persentase pemenuhan administrasi umum PD(%)	100	244,800,000																																													

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting																																												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp			K	Rp																																														
								1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	2 paket	2,300,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	3,000,000																																													
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)	3 paket ATK,termasuk bahan komputer	30,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)	4 paket ATK,termasuk bahan komputer	41,500,000	disesuaikan dengan kebutuhan																																												
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket alat kebersihan	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4paket alat dan bahan kebersihan	8,000,000																																													
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	BBM dan pelumas 1 paket, makan minum rapat internal 1 paket, kopi, gula, air kemasan 1 paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	BBM dan pelumas 1 paket, kopi, gula, air kemasan 1 paket, makan minum internl 1 paket (total 3 paket)	50,300,000																																													
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 paket (jilid dan penggandaan)	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	3 paket (jilid dan penggandaan)	45,000,000																																													
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,000,000																																													
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	1 laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	1 laporan	20,000,000																																													
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	45,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	75,000,000																																													
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73.17	58,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73.17	91,000,000																																													
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)			Pengadaan Mebeleur	Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	Meja kerja pejabat 1 unitt, bangku tunggu 2 unit, rak kayu 2 unit (5 unit)	45,000,000	disesuaikan dengan kebutuhan																																												
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	AC 2unit (AC berdiri),	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	AC 2 unit (AC berdiri),	28,000,000																																													
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan	1 unit website BP4D	25,000,000						Laman website sudah disiapkan dari Dinas Kominfo																																												
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laptop 1 unit, Printer 1 unit	15,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laptop 1 unit , Printer 1 unit	15,000,000																																													
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	gorden iris 4 unit	3,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	gorden iris 4 unit	3,000,000																																													

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting																																												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp			K	Rp																																														
								1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	254,300,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	263,900,000																																													
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1,500,000																																													
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12	80,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12	80,000,000																																													
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	172,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	182,400,000																																													
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	84.004	69,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	84.004	95,000,000																																													
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit = roda 4 (2 unit), roda 2 (16 unit)	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit = roda 4 (2 unit), roda 2 (16 unit)	40,000,000																																													
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit (12 kursi rapat,3 lemari)	3,500,000	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit (12 kursi rapat,3 lemari)	10,000,000																																													
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 genset, 5 unit AC, sound system	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 genset, 11 unit AC, sound system	10,000,000																																													
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 website Bp4D	5,000,000	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 website Bp4D	5,000,000																																													
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit	10,000,000																																													
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	11 laptop, printer 3 , infocus 3, PC unit 4,scanner 1	5,500,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5 laptop, printer 3 , infocus 3, PC unit 2,scanner 1	10,000,000																																													
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	pagar, halaman dan parkir, gorden	5,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	pagar, halaman dan parkir, gorden (3 unit)	10,000,000																																													
5	01				Perencanaan					Perencanaan																																																	
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1,693,000,000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1,653,000,000																																													
					Larantuka, seluruh Kecamatan	Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)		100	124,000,000		Larantuka, seluruh Kecamatan	Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	148,000,000																																													

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp				K	Rp	
									1	2				3	4	
							Larantuka, Kupang, Jakarta	Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1,569,000,000		Larantuka, Kupang, Jakarta	Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1,505,000,000	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	1,323,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	1,217,000,000	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen Ranwal RKPD 2024, 1 dokumen ranwal RPJPD	54,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen Ranwal RKPD 2024, 1 dokumen ranwal RPJPD	44,000,000	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Larantuka, Kupang, Jakarta		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)	1 dokumen	170,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)	1 dokumen	25,000,000	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laarantuka		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	1	50,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laarantuka	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	1	25,000,000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Larantuka		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	1	25,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	1	25,000,000	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Flores Timur		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	1	118,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Flores Timur	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	1	128,000,000	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laarantuka		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1600 usulan	6,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laarantuka	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1600 usulan	20,000,000	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	900,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	950,000,000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku profil	80,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku profil	80,000,000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	80,000,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	80,000,000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	190,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	245,000,000	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Larantuka, Kupang		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	45,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Larantuka, Kupang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	45,000,000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting																																												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp			K	Rp																																														
								1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Larantuka	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)	13 LSM/NGO	40,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Larantuka	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)	13 LSM/NGO	50,000,000																																													
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(laporan)	5	105,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(laporan)	5	150,000,000	Evaluasi tidak hanya pada RKPD saja namun juga pada RPJMD																																												
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan	2 dok	100,000,000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan	2 dok	111,000,000																																													
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dok)	1	40,000,000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dok)	1	50,000,000																																													
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)	1	60,000,000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)	1	61,000,000																																													
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah																																																	
							<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)</i>	100	284,500,000			<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)</i>	100	564,500,000																																													
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>	100	117,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>	100	227,000,000																																													
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	32,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	44,000,000																																													
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13	19,000,000																																													
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	1	17,500,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	1	31,500,000																																													

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp			K	Rp		
								1	2			3	4	5	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1	19,000,000	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	44,000,000	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6	19,000,000	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6	17,500,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6	31,500,000	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	19,000,000	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang	100	110,500,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang	100	224,500,000	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	1	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	1	44,000,000	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	19,000,000	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	15,500,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	30,500,000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp			K	Rp		
								1	2			3	4	5	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	19,000,000	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	44,000,000	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	19,000,000	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	15,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	5	30,000,000	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	19,000,000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	57,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	113,000,000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1	44,000,000	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	19,000,000	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	17,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	31,000,000	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	5,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	19,000,000	
5	05				Penelitian dan Pengembangan					Penelitian dan Pengembangan					
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				342,000,000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				282,000,000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting																																												
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp			K	Rp																																														
								1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11	
							Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	220,000,000			Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	190,000,000																																													
							Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3	122,000,000			Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3	92,000,000																																													
5	05	02	2.03				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	220,000,000			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	190,000,000																																													
5	05	02	2.03	02			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																																															
5	05	02	2.03	03			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																																															
5	05	02	2.03	04			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	220,000,000			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	190,000,000																																													
5	05	02	2.03	05			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																																															
5	05	02	2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3	122,000,000			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3	92,000,000																																													
5	05	02	2.04	01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	122,000,000			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	92,000,000	Kategori OPD, masyarakat dan pendidikan																																												

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk tahun 2023 ada 2 usulan masyarakat yang diusulkan oleh desa. Usulan tersebut terkait permintaan fasilitasi dan koordinasi Program Pamsimas untuk desa Blepanawa dan Lewokluok dimana hal tersebut sudah dilakukan dan nanti akan disesuaikan dengan petunjuk teknis program tersebut selanjutnya. Dengan demikian tahun 2023, BPPPPD akan menjalankan program kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan evaluasi kinerja dari BPPPPD dengan beberapa kegiatan koordinasi pada bidang dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel II.4 berikut :

Tabel. II.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Desa Blepanawa dan Desa Lewokluok	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1 dokumen	Usulan tersebut terkait permintaan fasilitasi dan koordinasi Program Pamsimas untuk desa Blepanawa dan Lewokluok dimana hal tersebut sudah dilakukan dan nanti akan disesuaikan dengan petunjuk teknis program tersebut selanjutnya

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yakni (1) *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;* (2) *Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;* (3) *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing* (4) *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;* (5) *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;* (6) *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;* dan (7) *Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;*.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur mengemban PN (7) dimana PN (7) dilaksanakan melalui Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, Reformasi Birokrasi dan tata kelola. Program yang mendukung diantaranya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah .

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPPPD

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusnya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur,

Tujuan dan sasaran Renja BPPPPD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renja
BPPPPD Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun
			2023
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
	Meningkatnya hasil kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan	1 dok
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan renja awal dalam periode Renstra 2023-2026. Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPPPD selama satu tahun

ke depan merupakan penerjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dalam upaya reformasi birokrasi yang didasarkan pada arah kebijakan dan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah terlihat dalam dokumen RKPD tahun 2023 yakni pada prioritas Reformasi birokrasi, dengan sasaran (1) meningkatnya koordinasi lintas sector dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan indicator sasaran yakni persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD, (2) meningkatnya inovasi daerah dengan indicator sasaran persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel.III.2

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	8	9		10	
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2,499,500,000				2,451,790,000	
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1,653,000,000	APBD II (DAU)			1,584,800,000	
					<i>Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)</i>		100	148,000,000	APBD II (DAU)		100	270,800,000	
					<i>Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)</i>		100	1,505,000,000	APBD II (DAU)		100	1,314,000,000	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>		3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	1,217,000,000	APBD II (DAU)		3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	1,056,800,000
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen Ranwal RKPD 2024, 1 dokumen ranwal RPJPD	44,000,000	APBD II (DAU)		1 dokumen Ranwal RKPD 2025	60,000,000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen	25,000,000	APBD II (DAU)		1 dokumen	30,000,000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)</i>	Larantuka	1	25,000,000	APBD II (DAU)		1	36,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)</i>	Larantuka	1	25,000,000	APBD II (DAU)		1	40,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota</i>	Kab Flores Timur	1	128,000,000	APBD II (DAU)		1	245,800,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)</i>	Larantuka	1600 usulan	20,000,000	APBD II (DAU)		1600 usulan	25,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
												9	10
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Larantuka	3 dokumen (RKPD Penetapan 2024 dan Perubahan RKPD 2023, RPJPD)	950,000,000	APBD II (DAU)		2 dokumen (RKPD Penetapan 2025 dan Perubahan RKPD 2024	620,000,000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 buku profil	80,000,000	APBD II (DAU)		1 buku profil	90,000,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Larantuka	1	80,000,000	APBD II (DAU)		1	90,000,000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)		100	245,000,000	APBD II (DAU)		100	275,000,000
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Larantuka,Kupang	2	45,000,000	APBD II (DAU)		2	60,000,000
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)	Larantuka	13 LSM/NGO	50,000,000	APBD II (DAU)		14 LSM/NGO	70,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(laporan)	Larantuka,Kupang, Jakarta	5	150,000,000	APBD II (DAU)	Evaluasi tidak hanya pada RKPD saja namun juga pada RPJMD	4	145,000,000
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)		2 dok	111,000,000	APBD II (DAU)		2 dok	163,000,000
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dok)	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	50,000,000	APBD II (DAU)		1	78,000,000
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	61,000,000	APBD II (DAU)		1	85,000,000
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
						Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)		100	564,500,000	APBD II (DAU)		100	581,990,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
												1	2
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>		100	227,000,000	APBD II (DAU)		100	234,365,000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	44,000,000	APBD II (DAU)		1	45,320,000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	13	19,000,000	APBD II (DAU)		13	19,570,000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	31,500,000	APBD II (DAU)		1	32,445,000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	19,000,000	APBD II (DAU)		1	19,570,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	44,000,000	APBD II (DAU)		1	45,875,000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	6	19,000,000	APBD II (DAU)		6	19,570,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	6	31,500,000	APBD II (DAU)		6	32,445,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	19,000,000	APBD II (DAU)		1	19,570,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan</i>		100	224,500,000	APBD II (DAU)		100	231,235,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
												1	2
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	44,000,000	APBD II (DAU)		1	45,320,000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	4	19,000,000	APBD II (DAU)		4	19,570,000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	4	30,500,000	APBD II (DAU)		4	31,415,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	19,000,000	APBD II (DAU)		1	19,570,000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	44,000,000	APBD II (DAU)		1	45,320,000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	5	19,000,000	APBD II (DAU)		5	19,570,000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	5	30,000,000	APBD II (DAU)		5	30,900,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	19,000,000	APBD II (DAU)		1	19,570,000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan		100	113,000,000	APBD II (DAU)		100	116,390,000
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	44,000,000	APBD II (DAU)		1	45,320,000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Larantuka,Kupang, Jakarta	4	19,000,000	APBD II (DAU)		4	19,570,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
												9	10
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	4	31,000,000	APBD II (DAU)		4	31,930,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	19,000,000	APBD II (DAU)		1	19,570,000
5	05				Penelitian dan Pengembangan								
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				282,000,000	APBD II (DAU)			285,000,000
						<i>Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)</i>		1	190,000,000	APBD II (DAU)		1	192,900,000
						<i>Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)</i>		3	92,000,000	APBD II (DAU)		3	92,100,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (dok)</i>		1	190,000,000	APBD II (DAU)		1	192,900,000
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				APBD II (DAU)			
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</i>				APBD II (DAU)			
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	1	190,000,000	APBD II (DAU)			
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</i>				APBD II (DAU)		1	192,900,000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)</i>		3	92,000,000	APBD II (DAU)		3	92,100,000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	Larantuka,Kupang, Jakarta	3	92,000,000	APBD II (DAU)		3	92,100,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja sangat penting yakni sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2023 ini terdapat 4 program, 17 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. **5,602,018,558**, seperti yang terlihat pada table IV.1 berikut ini:

Tabel.IV.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		5.602.018.558						5.532.121.115	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		3.102.518.558						3.080.511.115	
xxx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.102.518.558			PP	100	3.080.511.115	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100		
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	53,8						53,8		
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)	13	75.400.000	Larantuka			KP	13	45.000.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	45.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15.000.000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.000.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	10.000.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.400.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	10.000.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	3	2.279.418.558	Larantuka			KP	3	2.333.211.115

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	26/12	2.226.418.558	Larantuka	APBD II (DAU)			26/12	2.293.211.115
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	1	38.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	30.000.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (dokumen)</i>	2	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.000.000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)</i>	6	15.000.000				KP	6	7.500.000
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)</i>	6	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	7.500.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	3	38.000.000				KP	3	43.000.000
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian (dokumen)</i>	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.000.000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	5.000.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	3	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	25.000.000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	3	8.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	8.000.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)</i>	100	244.800.000				KP	100	247.000.000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>	3	3.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	3.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	41.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	42.000.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	8.000.000		APBD II (DAU)			2	8.000.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	3	50.300.000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	51.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	3	45.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	46.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	2.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	2.000.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	20.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	75.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			12	75.000.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		91.000.000				KP		91.000.000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	5	45.000.000	Larantuka				5	45.000.000
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	28.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	28.000.000
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	2	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15.000.000
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	4	3.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	3.000.000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	263.900.000				KP	100	213.800.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	1.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	1.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	80.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	40.000.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	182.400.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	172.800.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		95.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		KP	84,5	100.000.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	40.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	40.000.000
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	15	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			15	10.000.000
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	6	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	10.000.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	22	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	10.000.000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000
5	01				Perencanaan			2.217.500.000						2.166.790.000
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.653.000.000			PN-7	PU-4	100	1.584.800.000
						Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100					100		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (dokumen)	3	1.217.000.000			KP-7	KU-4	2	1.190.000.000
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	44.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	40.000.000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dokumen)	1	25.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	20.000.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	1	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	20.000.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	1	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	20.000.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota (Berita Acara)	1	128.000.000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			1	120.000.000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1600	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1600	20.000.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)(dokumen)	3	950.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	950.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	80.000.000			KP-7	KP-4	1	60.000.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	80.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	60.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	245.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)	KP-7	KP-4	100	220.000.000
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (laporan)	2	45.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	45.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)	13	50.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	50.000.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)	5	150.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			4	125.000.000
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	111.000.000			KP-7	KP-4	2	114.800.000
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dokumen)	1	50.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	50.000.000
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	61.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	64.800.000
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	564.500.000			PN-7	PU-4	100	581.990.000
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	227.000.000			KP-7	KP-4	100	237.740.000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)	1	44.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	44.880.000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat daerah)	13	19.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			13	20.720.000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	1	31.500.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	32.130.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1	19.000.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	21.000.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	44.000.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	44.880.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat daerah)	6	19.000.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			6	21.000.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6	31.500.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			6	32.130.000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	19.000.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	21.000.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)	100	224.500.000			KP-7	KP-4	100	228.990.000
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD/RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	44.000.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	44.880.000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	4	19.000.000	Larantuka,Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			4	19.380.000

K O D E					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024				
U	R	B	L	P			K	K	E	S	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	4	30.500.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						4	31.110.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	1	19.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						1	19.380.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dokumen)	1	44.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						1	44.880.000
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	19.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						5	19.380.000
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	30.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						5	30.600.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (laporan)	1	19.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						1	19.380.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	113.000.000		APBD II (DAU)	KP-7	KP-4			100	115.260.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD/RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	44.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)						1	44.880.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPPPPD Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPPPD Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi BPPPPD dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2023. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, BPPPPD Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023.

Larantuka, Juni 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Flores Timur,



Apolonia Corebima, S.E, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002